



Aktualisasi Pancasila dan Civil Society Diera Globalisasi

Kamdani^{1*}, Dian², Fachri Abdu Wiguna³

^{1,2,3} Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Program Studi Ilmu Hadits, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

kamdani4003004@uinsu.ac.id^{1*}, dinadini1006@gmail.com², fachri172006@gmail.com³

Alamat Kampus: Jl William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: kamdani4003004@uinsu.ac.id

Abstract. *This study employs a descriptive qualitative approach to explore the actualization of Pancasila values in fostering civil society in the globalization era. Literature review serves as the primary method, analyzing data from journals, books, academic articles, and official documents. The study identifies key themes regarding Pancasila's role in politics, law, socio-culture, economy, and education. Findings reveal that implementing Pancasila values strengthens unity, social justice, and tolerance through character education, community participation, and strengthening civil institutions. In the globalization context, Pancasila faces challenges such as radicalism, misinformation, and digital inequality, but also opens opportunities for innovation through information technology, cultural preservation, and e-governance. Civil society plays a pivotal role in integrating Pancasila values with global dynamics to build social harmony and a resilient national identity.*

Keywords: *Pancasila, Civil Society, Globalization*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan masyarakat madani di era globalisasi. Studi literatur menjadi metode utama, menganalisis data dari jurnal, buku, artikel akademik, dan dokumen resmi. Penelitian ini mengidentifikasi tema utama peran Pancasila dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat persatuan, keadilan sosial, dan toleransi melalui pendidikan karakter, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan sipil. Dalam konteks globalisasi, Pancasila menghadapi tantangan seperti radikalisme, disinformasi, dan kesenjangan digital, namun juga membuka peluang untuk inovasi melalui teknologi informasi, pelestarian budaya, dan e-governance. Peran masyarakat sipil menjadi kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika global guna membangun harmoni sosial dan identitas nasional yang kokoh.

Kata Kunci: Pancasila, Masyarakat Madani, Globalisasi

1. LATAR BELAKANG

Pancasila berasal dari sanskerta yaitu "panca" yang berarti "lima" dan "sila" yang berarti "prinsip atau dasar". Jadi Pancasila memiliki arti lima dasar. Pancasila memiliki peran penting dalam negara Indonesia. Dimana, Pancasila adalah landasan atau dasar negara sebagai dasar negara sejak kemerdekaan. Civil society atau Masyarakat madani merupakan kumpulan individu dan organisasi independen yang berperan aktif dalam kehidupan public. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan identik dengan kemoralan yang sangat baik. Konsep kehidupan masyarakat madani yang seimbang, tentram dan terstruktur adalah cita-cita yang diinginkan oleh Bangsa Indonesia.

Menurut Muhammad Iqbal dalam (Hasanah, 2021) pemuda generasi milenial Indonesia mulai perlahan, dan menjadi jelas kehilangan karakter asli sebagai warga Indonesia. Hal yang menentukan karakter generasi muda ini sangat bergantung pada tren yang beredar secara digital termasuk media sosial. Dalam pusat keterbukaan adalah pentingnya untuk memperkuat kepribadian moral anak berdasarkan agama dan Pancasila. Dengan mempengaruhi orang, prinsipnya menjadi lebih kuat, memilih dan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak, apa yang pantas dan apa yang tidak. (Muthohar, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan masyarakat madani (civil society) di era globalisasi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk memperoleh data dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan dokumen resmi terkait. Literatur yang dianalisis mencakup pandangan teoretis dan empiris mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa serta konsep masyarakat madani dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya.

Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi dan menyoroti tema-tema utama terkait peran dan relevansi Pancasila. Tema-tema yang diangkat meliputi pengaruh Pancasila dalam bidang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Pendekatan tematik ini membantu peneliti memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keadilan sosial, toleransi, dan persatuan di tengah tantangan globalisasi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis kontekstual untuk mengevaluasi relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika global, seperti arus informasi digital, pluralisme, dan ancaman disintegrasi sosial. Dalam proses ini, strategi implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti pendidikan karakter, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan masyarakat sipil, menjadi fokus kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian aktualisasi Pancasila

Aktualisasi adalah sebuah penerapan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penerapan sesuatu yang nyata dan berdampak. Sehingga, Aktualisasi Pancasila dapat diartikan sebagai upaya nyata untuk menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individu, Masyarakat, maupun negara, mewujudkan cinta-cita bangsa, dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam beragama.¹

Untuk mewujudkan sebuah negara yang seimbang, teratur dan terstruktur memerlukan sebuah penerapan dalam kehidupan sehari-hari (aktualisasi) dengan dasar negara atau ideologi negara yang telah disepakati bersama. Peran aktualisasi Pancasila:

a. Pedoman hidup berbangsa dan bernegara

- 1) Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antar-agama, suku, dan ras.
- 2) Menciptakan Keadilan Sosial: Nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.
- 3) Menjamin Hak Asasi Manusia: Pancasila menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama dan bebas untuk berekspresi.

b. Solusi atas permasalahan bangsa

- 1) Mencegah Konflik: Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, berbagai konflik sosial dapat dihindari atau diselesaikan secara damai.
- 2) Membangun Demokrasi: Pancasila menjadi landasan dalam membangun demokrasi yang berkarakter Pancasila, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat.
- 3) Menghadapi Tantangan Global: Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi benteng bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti globalisasi, liberalisasi, dan radikalisme.

c. Pembinaan karakter berbangsa

- 1) Membentuk Karakter Positif: Pancasila membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, berintegritas, dan bertanggung jawab.
- 2) Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air: Nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.
- 3) Menghindari Ancaman Disintegrasi Bangsa: Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, maka ancaman disintegrasi bangsa dapat dihindari.

Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain:

- a. Penguatan Pendidikan Karakter: Melalui kurikulum pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, serta program-program ekstrakurikuler yang relevan.

¹ Hernadi affandi, *Pancasila: ekstensi dan aktualisasi*, penerbit ANDI Yogyakarta, 2020

- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
- c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Sipil: Membangun kelembagaan masyarakat sipil yang kuat, mandiri, dan profesional.
- d. Kolaborasi Multisektor: Membangun kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan memperluas jangkauan advokasi.

Contoh aktualisasi Pancasila

Berikut adalah beberapa contoh aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan:

- a. Bidang Politik
 - 1) Pemilihan umum yang demokratis: Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) merefleksikan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 - 2) Sistem pemerintahan yang terbuka: Penerapan sistem pemerintahan yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik menunjukkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Bidang Hukum
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang berkeadilan: Pembuatan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara merupakan wujud dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 2) Penerapan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu: Penegakan hukum yang tidak diskriminatif mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bidang Ekonomi
 - 1) Pembangunan ekonomi yang merata: Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan lapangan kerja merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan koperasi.
 - 2) Pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat menunjukkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam sila persatuan Indonesia.

d. Bidang Sosial Budaya

- 1) Toleransi antaragama dan suku bangsa: Kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati antaragama dan suku bangsa merupakan wujud nyata dari nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan persatuan Indonesia.
- 2) Pelestarian budaya bangsa: Upaya pelestarian budaya dan tradisi bangsa menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

e. Bidang Pendidikan

- 1) Pendidikan karakter: Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah.
- 2) Pendidikan yang berkualitas dan merata: Upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga negara mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Pengertian civil society

Civil society atau masyarakat sipil merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks sosial dan politik untuk merujuk pada kelompok-kelompok independen yang berada di luar negara dan pasar. Kelompok-kelompok ini memiliki tujuan untuk memajukan kepentingan umum dan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, politik, dan ekonomi.² Karakteristik Civil Society:

- a. Independen: Tidak terikat secara langsung dengan pemerintah atau partai politik.
- b. Sukarela: Berbasis pada inisiatif dan partisipasi sukarela dari anggota masyarakat.
- c. Non-profit: Tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu.
- d. Beragam: Meliputi berbagai macam organisasi, seperti LSM, organisasi keagamaan, komunitas, dan kelompok advokasi.
- e. Berbasis masyarakat: Berakar pada nilai-nilai dan kepentingan masyarakat setempat.

Peran Civil Society:

- a. Pengawasan terhadap pemerintah: Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
- b. Pemberdayaan masyarakat: Memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

² Munir, Civil society: Dari Utopia menuju realitas, Yogyakarta, LKIS, 2001.

- c. Pendidikan dan kesadaran publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial.
- d. Jembatan antara pemerintah dan masyarakat: Menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.³

Peran Civil Society dalam Aktualisasi Pancasila

- a. Pendidikan Karakter: Masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan karakter kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila akan membantu membentuk generasi yang berakhlak mulia, toleran, dan memiliki jiwa nasionalisme.
- b. Advokasi Kebijakan Publik: Masyarakat sipil dapat mengawal dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.
- c. Penguatan Demokrasi: Masyarakat sipil dapat berperan dalam memperkuat demokrasi melalui partisipasi aktif dalam proses politik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia.
- d. Pengembangan Masyarakat: Masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- e. Toleransi dan Kerukunan: Masyarakat sipil dapat menjadi jembatan penghubung antar kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan toleran.

Contoh Civil Society:

Berikut ini adalah beberapa contoh dari civil society, yakni:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Fokus pada isu-isu sosial tertentu, seperti lingkungan, hak asasi manusia, atau pemberdayaan masyarakat.
- b. Organisasi keagamaan: Berperan dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Komunitas: Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, misalnya komunitas lingkungan, komunitas seni, atau komunitas olahraga.
- d. Serikat pekerja: Membela hak dan kepentingan pekerja.

³ Arief Budiman, *Demokrasi dan civil society di Indonesia*, Jakarta, buku Kompas, 2016

Pancasila dan Civil Society dalam Konteks Globalisasi

Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa relevan dalam menghadapi dinamika zaman. Namun, tantangan globalisasi seperti arus informasi yang deras, pluralisme yang tinggi, dan pengaruh budaya asing, menuntut upaya-upaya kreatif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat sipil, dengan beragam bentuk organisasinya, memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Aktualisasi Pancasila dalam konteks civil society di era globalisasi dilihat dari berbagai aspek, seperti:

a. Aspek Kehidupan Berbangsa

- 1) Pengakuan Hukum: Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh negara dan masyarakat sipil merupakan aktualisasi dari sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".
- 2) Demokrasi Partisipatif: Pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembuatan kebijakan publik mencerminkan semangat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan".

b. Tantangan dan Peluang

Dalam mengaktualisasikan Pancasila di era globalisasi, masyarakat sipil juga menghadapi berbagai tantangan, seperti radikalisme, intoleransi, disinformasi, kesenjangan sosial, dan intervensi asing. Namun, di sisi lain, terdapat juga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti perkembangan teknologi informasi, keterbukaan informasi, dan kolaborasi antar berbagai pihak.

- 1) Globalisasi dan Identitas: Menurut Scholte (2015) dalam "Globalization: A Critical Introduction," globalisasi telah mengubah konsep kedaulatan negara, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik, serta mentransformasi identitas budaya. Dalam konteks ini, ideologi nasional seperti Pancasila menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan adaptif. Era globalisasi memperkenalkan nilai-nilai baru yang dapat mempengaruhi identitas nasional dan memperlemah nilai-nilai Pancasila.

Paparan terhadap budaya global dapat menyebabkan krisis identitas, terutama di kalangan generasi muda. Menurut penelitian Widisuseno (2019) dalam Jurnal Ketahanan Nasional, terdapat kecenderungan menurunnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial.

- 2) Teknologi dan Informasi: Penggunaan teknologi digital dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan memperluas akses informasi tentang nilai-nilai Pancasila.

Era globalisasi tidak bisa dipisahkan dari revolusi teknologi digital. Dalam konteks ini, Pancasila menghadapi tantangan dan peluang baru:

a) Tantangan:

Keamanan data dan privasi: Perkembangan big data dan kecerdasan buatan menimbulkan isu etis terkait penggunaan data pribadi, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila.

Kesenjangan digital: Akses tidak merata terhadap teknologi dapat memperburuk ketimpangan sosial, menantang prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

Penyebaran informasi palsu: Media sosial dan platform digital mempermudah penyebaran hoax dan disinformasi yang dapat mengancam persatuan dan kerukunan sosial.

b) Peluang:

E-governance: Teknologi digital dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan, sejalan dengan sila keempat Pancasila tentang demokrasi deliberatif.

Inovasi sosial dan Kewirausahaan sosial digital: Platform digital dapat memfasilitasi gotong royong dan solidaritas sosial dalam skala yang lebih luas dan Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat mendorong inovasi dalam kewirausahaan sosial yang memanfaatkan teknologi digital.

Pelestarian budaya: Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai Pancasila.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, menjadi landasan bagi masyarakat sipil (civil society) untuk berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi yang dinamis. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi merupakan tantangan yang kompleks namun juga merupakan peluang besar untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Masyarakat sipil sebagai aktor penting memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai

Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tetap memiliki relevansi yang kuat di era globalisasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Pancasila menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi dinamika global.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, H. (2020). *PANCASILA - Ekstensi dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Alfin, H. (2004). *Masyarakat Madani: Konsep, Realitas, dan Tantangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arifin, E. (2010). *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Kencana.
- Budiman, A. (2016). *Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koenjaraningrat. (1984). *Kapita selekta Antropologi Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mahfud MD. (2005). *Pancasila dan Demokrasi Liberal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Munir, M. (2001). *Civil Society: Dari Utopia menuju Realitas*. Yogyakarta: LKIS.
- Said, A. (2003). *Negara dan Masyarakat Sipil*. Jakarta.
- Tambunan, B. A. Y., Harahap, I., Nabillah, R., & Silaban, P. S. (2024). Peranan dan strategi Bank Indonesia serta pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 174–181. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1601>
- Wiku, F., & Ayuningtyas, F. J. (2021). Determinan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui pendekatan makroekonomi. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 214. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i2.12409>